

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

DPRD Jateng Dorong Anggaran Pendidikan Rp5 Triliun

SEMARANG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng mendorong Pemprov mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 20% dari APBD Jateng.

Jika terealisasi, maka anggaran pendidikan murni dari APBD Jateng saja bisa mencapai Rp 5 triliun. Nominal anggaran itu juga akan naik drastis jika dibandingkan pada tahun ini. Urusan pendidikan dan kebudayaan pada tahun ini memperoleh anggaran Rp 5,7 triliun.

Namun alokasi tersebut sudah termasuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari APBN. Belanja tidak langsung senilai Rp 3,874 triliun dan belanja langsung Rp 1,847 triliun. Sebagai gambaran, nominal APBD Jateng 2018 adalah 24,971 triliun.

"Kami mendorong alokasi pendidikan tahun 2019 sebesar 20% dari APBD. Itu belum termasuk BOS dari APBN. Saat ini masih pembahasan," kata Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, kemarin.

Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng itu, pengalokasian anggaran 20% merupakan amanat undang-undang. Dengan alokasi sebesar itu, artinya Bapemperda mendorong Pemprov memprioritaskan urusan pendidikan masyarakat.

Alasannya, sejauh ini gubernur dan wakilnya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur daripada membangun sumber daya manusia.

Jika melihat data pencapaian pendidikan di Jateng, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus terus digenjut. Angka putus sekolah SMA/SMALB/MA/SMK pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 ditarget 0,05%.

Persentase ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai stan-



SM/dok

Yudi Indras W

dar nasional pendidikan pada akhir RPJMD ditarget 90%. Sementara realisasi sampai akhir 2017 sebesar 88,01%. Perpustakaan standar nasional pada pendidikan menengah ditarget 95% dan realisasi akhir 2017 sebesar 94,04%.

Jumlah siswa pendidikan menengah dan pendidikan khusus penerima bantuan siswa miskin (BSM) pada akhir RPJMD ditarget sebanyak 69.418 orang. Realisasi sampai akhir 2017 sebanyak 48.996 siswa.

Alasan lain, hal itu untuk mendorong percepatan pembangunan pendidikan di Jateng melalui peningkatan kualitas pendidik.

"Selama ini dana banyak terserap untuk infrastruktur. Kami mendorong pembangunan (sumber daya) manusia," imbuh Yudi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng.

Di sisi lain, Yudi juga meminta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri 2018 dievaluasi. Terutama menyangkut persyaratan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pendidikan siswa miskin memang menjadi tanggung jawab negara, namun metode seleksi tidak bisa dihadapkan dengan prestasi siswa.

Keduanya beda kategori dan mestinya prestasi lebih jadi pertimbangan penerimaan."Ke depan, seleksi jalur SKTM atau KIP harus dijalankan pertama agar bisa dilakukan verifikasi lebih dulu," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo belum bisa dimintai tanggapan perihal alokasi anggaran pendidikan ini. Telepon dan SMS yang dikirim padanya belum direspons. (H81-19)